



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
INSPEKTORAT DAERAH

Jln. Sutan Syahrir No. 238 Padang Panjang Kode Pos 27118
Telp. (0752) 84506

website: padangpanjangkota.go.id, email: inspektorat@padangpanjang.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah pada Kecamatan Padang Panjang Barat untuk tahun anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kecamatan Padang Panjang Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Padang Panjang, 28 Maret 2024

Inspektur,



Dr. Syahril, SH, MH, CGCAE
NIP.197004051997031004

2023

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)**

**KECAMATAN
PADANG PANJANG BARAT**
JL. RASUNA SAID NO, 44 KAMPUNG MANGGIS PADANG PANJANG


KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKjIP) Kecamatan Padang Panjang Barat Tahun 2023 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. LKjIP Kecamatan Padang Panjang Barat Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Padang Panjang, 27 Desember 2023

**CAMAT PADANG PANJANG BARAT
KOTA PADANG PANJANG**



**ROMI AR RAHMAN, ST
NIP. 19821012 201101 1 008**

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Padang Panjang Barat Tahun 2023 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Kecamatan Padang Panjang Barat Tahun 2018-2023. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan capaian kinerja Kecamatan Padang Panjang Barat yang dihasilkan di tahun 2023 sebagai berikut :

❖ **Tujuan**

Tujuan dari Renstra Kecamatan Padang Panjang Barat : “Meningkatnya peran serta kelompok/lembaga masyarakat dalam pembangunan” dengan Indikator Tujuannya adalah “Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif” dengan target tahun 2023 sebesar 95% dan realisasi sebesar 100%.

❖ **Sasaran**

Sasaran Kecamatan Padang Panjang Barat terdiri dari 2 (dua) sasaran yaitu:

1. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan, Kelurahan;
2. Meningkatkan Kualitas Layanan Publik yang Transparan dan Akuntabel di Kecamatan dan Kelurahan.

❖ Indikator Sasaran Kecamatan Padang Panjang Barat, terdiri atas 2 indikator kinerja sasaran yaitu :

1. Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan dengan target tahun 2023 sebesar 42 % dan realisasi sebesar 32,66 % atau persentase capaian 77.69 %.
2. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dengan target tahun 2023 sebesar 93 dan realisasi 2023 sebesar 93,90 atau persentase capaian 100 %.

Faktor Pendorong untuk tercapainya Kinerja yang tinggi ini disebabkan :

- a. Koordinasi rutin antara kelurahan dengan lembaga kemasyarakatan;
- b. Sinergitas yang baik antara Kecamatan, Kelurahan dan Tokoh Masyarakat dalam pembangunan wilayah.
- c. Koordinasi rutin tingkat Kecamatan dengan Forkopimca (forum koordinasi pimpinan tingkat kecamatan) setiap tiga bulan sekali (triwulan) mengenai

- ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Evaluasi capaian kinerja yang dilakukan secara formal maupun informal.

Faktor Penghambat dalam pelaksanaan untuk mencapai Indikator tujuan dan sasaran strategis serta indikator program masih ditemukan beberapa kendala atau permasalahan antara lain :

1. Ketidakjelasan mengenai informasi dan sarana pengaduan layanan yang tersedia, kotak saran tersedia namun tidak difungsikan, hal tersebut dapat dilihat dari pencapaian target SKM tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.
2. Belum optimalnya kualitas SDM/personil pada Kecamatan Padang Panjang Barat;
3. Keterbatasan anggaran untuk peningkatan sarana prasarana dikarenakan adanya refocusing anggaran;

Rencana Tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut maka perlu dilakukan usaha-usaha sebagai berikut :

1. Mensosialisasikan alur pengaduan langsung terhadap masyarakat;
2. Membuat Standar Pelayanan setiap jenis layanan;
3. Perlu peningkatan kualitas SDM/personil di Kecamatan maupun di tingkat Kelurahan melalui bimtek/diklat;
4. Menganggarkan peningkatan sarana prasarana pelayanan pada tahun berikutnya.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Kecamatan Padang Panjang Barat ke depan, sebagai berikut :

1. Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
2. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
3. Pembangunan Kewilayahan
4. Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan
5. Keterbukaan Informasi Publik

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Kecamatan Padang Panjang Barat dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR.....	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Struktur Organisasi.....	1
1.2 Tugas dan Fungsi	5
1.3 Permasalahan Utama (strategic issued)	6
1.4 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.....	7
BAB II PERJANJIAN KINERJA	8
Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja.....	8
Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	10
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	10
B. Realisasi Anggaran	20
BAB IV PENUTUP	44

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran dan Indikator Renstra 2018-2023 Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang
Tabel	Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Padang Panjang Barat Tahun 2023
Tabel 3.1	Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023 Kecamatan Padang Panjang Barat
Tabel	Perhitungan Nilai SKM Tahun 2023 Kecamatan Padang Panjang Barat
Tabel 3.2	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 (Per Sasaran Strategis) Kecamatan Padang Panjang Barat
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dan Target Akhir Renstra (Per Sasaran Strategis) Kecamatan Padang Panjang Barat
Tabel 3.4	Analisis Efisiensi Sumber Daya
Tabel 3.5	Capaian Kinerja Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023 Kecamatan Padang Panjang Barat

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Padang Panjang Barat

Gambar 1.2 Struktur Organisasi Kelurahan Kecamatan Padang Panjang Barat

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Padang Panjang Barat Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Padang Panjang Barat Tahun 2023, diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Kecamatan Padang Panjang Barat;
2. Mendorong Kecamatan Padang Panjang Barat di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kecamatan Padang Panjang Barat untuk meningkatkan kinerjanya;
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Kecamatan Padang Panjang Barat di dalam pelaksanaan program/ kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1. TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan dijabarkan dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan bahwa Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, terdiri dari :

1.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Kecamatan Padang Panjang Barat

➤ **Camat :**

Camat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota yang tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota yang ada di kecamatan dan melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

➤ **Sekretariat :**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan kecamatan yang meliputi urusan umum dan perlengkapan, keuangan, kepegawaian, pendataan, evaluasi, pengendalian program dan pelaporan. Sekretariat terdiri dari :

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan program umum dan kepegawaian alam arti melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, administrasi perjalanan dinas, kerumahtanggaan, peralatan dan perlengkapan kantor, melaksanakan pengelolaan administrasi hukum, kehumasan, penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, pendidikan dan latihan, gaji berkala, cuti, kesejahteraan pegawai, kehadiran dan administrasi kepegawaian, organisasi, tata laksana dan kehumasan.

2) Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

mempunyai tugas menyelenggarakan program keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan dalam arti melaksanakan penyusunan anggaran, pembukuan, akuntansi dan verifikasi, pertanggungjawaban dan laporan keuangan, melakukan perencanaan, dokumentasi kegiatan pembangunan perhubungan, koordinasi penyusunan program, penyajian data, informasi, sinkronisasi dan analisis data, menyiapkan perumusan program rencana pembangunan perhubungan, pembinaan pelaksanaan program, evaluasi program, mengumpulkan, menghimpun, menginventarisasi data dari masing-masing seksi, melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pembuatan laporan.

➤ **Seksi Tata Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum**

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam arti menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di kelurahan-kelurahan, urusan kesatuan bangsa, kependudukan, ketenagakerjaan dan pengelolaan pendapatan daerah di ruang lingkup Kecamatan Padang Panjang Barat, mengkoordinir kegiatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan membuat rekomendasi akte catatan sipil serta melakukan proses administrasi pemberian rekomendasi perizinan sporadik tanah.

➤ **Seksi Pemberdayaan Masyarakat**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dalam arti menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi masyarakat, penanaman modal, tenaga kerja pariwisata, ketahanan pangan, pertanian, perdagangan, perindustrian, koperasi, UKM, pembinaan lomba Kelurahan dan urusan pembangunan di Kecamatan.

➤ **Seksi Sosial**

Seksi Sosial mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam penyelenggaraan urusan sosial dalam arti menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, evaluasi dan pelaporan urusan sosial,

pendidikan, kebudayaan, pemuda, olah raga, kesehatan, pengendalian penduduk, KB, perlindungan anak dan perempuan.

➤ **Seksi Pelayanan**

Seksi Pelayanan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam penyelenggaraan urusan pelayanan dalam arti menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, evaluasi dan pelaporan urusan pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup kecamatan dan kelurahan.

1.2 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Kelurahan se Kecamatan Padang Panjang

Barat

➤ **Lurah :**

Lurah mempunyai tugas membantu camat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan, melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat, melaksanakan pelayanan masyarakat, memelihara ketertiban umum, memelihara prasarana dan sarana serta fasilitas pelayanan umum, dan melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

➤ **Sekretariat :**

Sekretariat mempunyai tugas membantu Lurah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, pemeliharaan aset dan keuangan di lingkup Kelurahan.

➤ **Seksi Tata Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum**

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan ketertiban umum dalam arti menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan, pembinaan lomba kelurahan dan lurah berkompentensi, urusan kesatuan bangsa dan politik, kependudukan, mengkoordinasikan kegiatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, urusan pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan permukiman, lingkungan hidup, pengawasan dan penertiban bangunan, pembuangan air limbah, pengaliran

drainase, persampahan, penanggulangan bencana, perpustakaan dan kearsipan di kelurahan.

➤ **Seksi Pemberdayaan Masyarakat**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan ekonomi dan pembangunan dalam arti menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi masyarakat, penanaman modal, tenaga kerja pariwisata, ketahanan pangan, pertanian, perdagangan, perindustrian, koperasi, UKM, urusan pembangunan dan penataan ruang, perumahan kawasan pemukiman dan lingkungan hidup di Kelurahan.

➤ **Seksi Pelayanan dan Sosial**

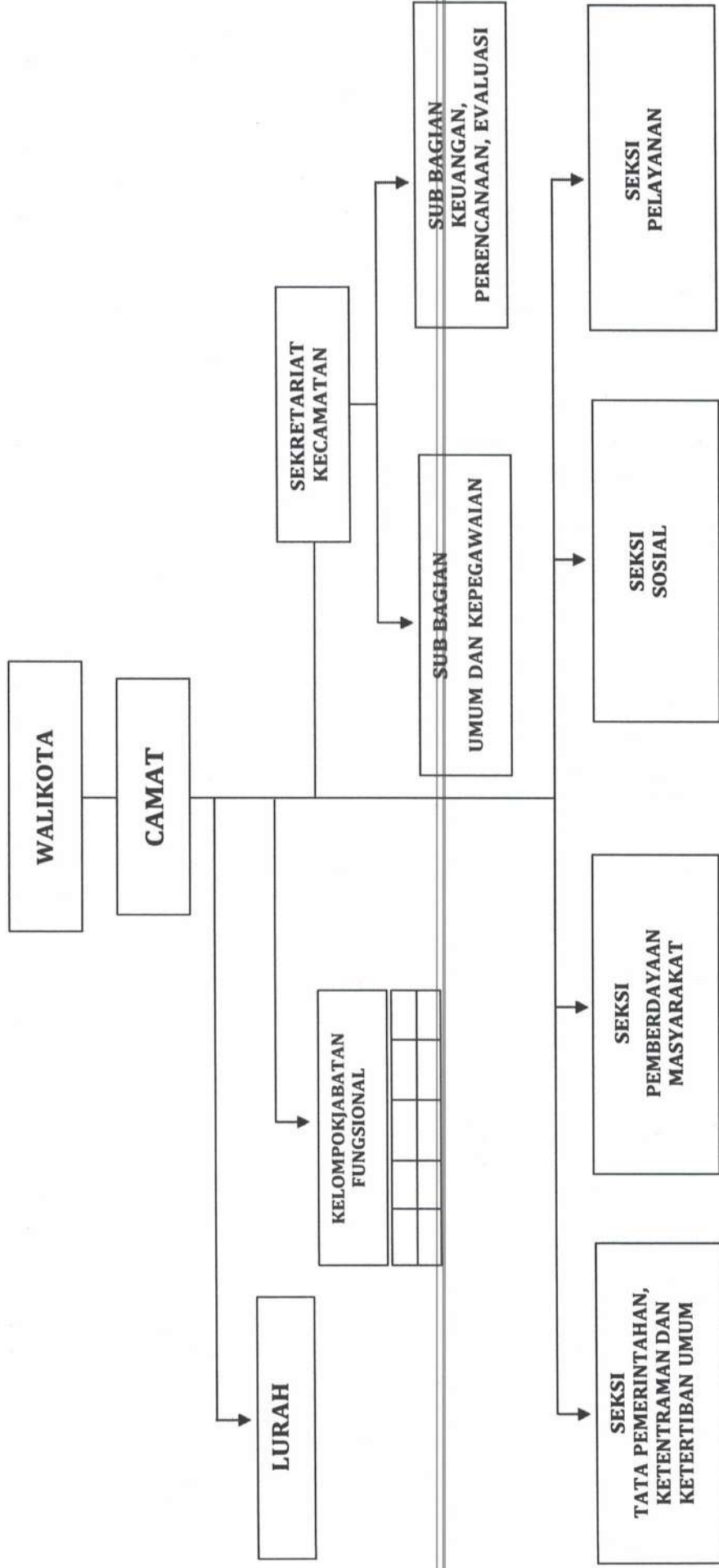
Seksi Pelayanan dan Sosial mempunyai tugas pokok membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan pelayanan dalam arti menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, evaluasi dan pelaporan urusan pelayanan perizinan dan non perizinan, sosial, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, pemuda dan olahraga, pengendalian penduduk, keluarga berencana, perlindungan anak dan perempuan di Kelurahan.

2. STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan mempunyai Struktur Organisasi sebagai berikut :

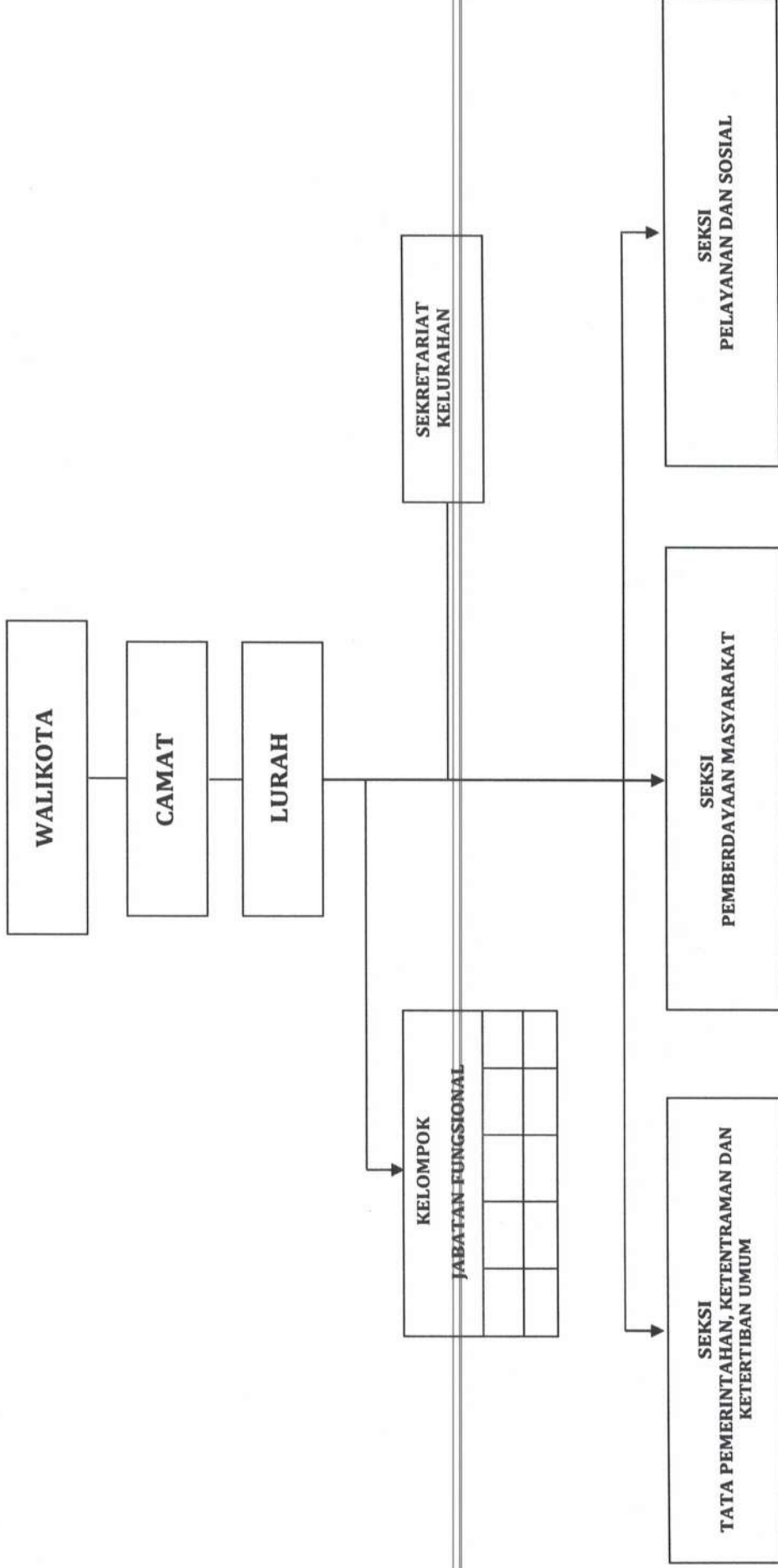
Gambar 1.1: STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT

Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 32 Tahun 2019



Gambar 1.2 : STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT

Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 32 Tahun 2019



3. SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang didukung oleh sumber daya manusia yang berada di kecamatan dan kelurahan, seperti pada tabel berikut :

Tabel. 1.1
Data Pegawai ASN, Pegawai Honoror, Tenaga Harian Lepas (THL)
di Lingkungan Kecamatan Padang Panjang Barat

No	Uraian	Lk	Pr	Jumlah
1.	Camat	1	-	1 orang
2.	Sekretaris Camat	-	1	1 orang
3.	Kepala Seksi di Kecamatan	1	3	4 orang
4.	Kasubbag di Kecamatan	1	1	2 orang
5.	Fungsional Umum di Kecamatan	6	3	9 orang
6.	Tenaga Honoror	-	2	2 orang
7.	Tenaga Harian Lepas Kecamatan:			
	- Operator	1	2	3 orang
	- Penjaga Kantor	1	-	1 orang
	- Sopir	2	-	2 orang
	- Petugas kebersihan Kantor	1	1	2 orang
8.	Lurah	8	-	8 orang
9.	Sekretaris Lurah	2	6	8 orang
10	Kasi di Kelurahan	12	12	24 orang
11	Fungsional Umum di Kelurahan	2	4	6 orang
12	Tenaga Harian Lepas di Kelurahan			
	- Operator	1	7	8 orang
	- Penjaga Kantor	8	-	8 orang
	- Petugas Kebersihan Kantor	1	7	8 orang
	Total	48	49	97 orang

Sumber Data : Kecamatan Padang Panjang Barat, Desember 2023

Berdasarkan Tabel di atas dapat dirinci personil/pegawai yang ada di kecamatan dan kelurahan keadaan Desember 2023 (tidak termasuk THL Kebersihan Lingkungan), sebagai berikut:

1. Kecamatan Padang Panjang Barat sebanyak 25 personil yakni : ASN 17 orang, Tenaga Honoror 2 orang, THL Operator Komputer 3 orang, THL Kebersihan Kantor 2 orang, THL Penjaga Kantor 2 orang, dan THL Sopir 2 orang.
2. Kelurahan Silaing Bawah sebanyak 7 personil yakni : ASN 7 orang, THL Operator Komputer 1 orang, THL Kebersihan Kantor 1 orang, THL Penjaga Kantor 1 orang.
3. Kelurahan Silaing Atas sebanyak 8 personil yakni : ASN 5 orang, THL Operator Komputer 1 orang, THL Kebersihan Kantor 1 orang, THL Penjaga Kantor 1 orang.
4. Kelurahan Pasar Usang sebanyak 8 personil yakni : ASN 5 orang, THL Operator

- Komputer 1 orang, THL Kebersihan Kantor 1 orang, THL Penjaga Kantor 1 orang.
5. Kelurahan Kampung Manggis sebanyak 8 personil yakni : ASN 5 orang, THL Operator Komputer 1 orang, THL Kebersihan Kantor 1 orang, THL Penjaga Kantor 1 orang
 6. Kelurahan Tanah Hitam sebanyak 8 personil yakni : ASN 5 orang, THL Operator Komputer 1 orang, THL Kebersihan Kantor 1 orang, THL Penjaga Kantor 1 orang
 7. Kelurahan Balai Balai sebanyak 9 personil yakni : ASN 6 orang, THL Operator Komputer 1 orang, THL Kebersihan Kantor 1 orang, THL Penjaga Kantor 1 orang
 8. Kelurahan Pasar Baru sebanyak 7 personil yakni : ASN 4 orang, THL Operator Komputer 1 orang, THL Kebersihan Kantor 1 orang, THL Penjaga Kantor 1 orang
 9. Kelurahan Bukit Surungan sebanyak 10 personil yakni : ASN 7 orang, THL Operator Komputer 1 orang, THL Kebersihan Kantor 1 orang, THL Penjaga Kantor 1 orang

Tabel 1.2
Data Kepegawaian Menurut Golongan

No.	Uraian	Jumlah		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1	Golongan IV	-	01 orang	01 orang
2	Golongan III	29 orang	22 orang	51 orang
3	Golongan II	4 orang	07 orang	11 orang
4	Golongan I	-	-	-

Sumber Data : Kecamatan Padang Panjang Barat, Desember 2023

Tabel 1.3
Data Kepegawaian Menurut Eselon

No.	Uraian	Jumlah		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1	Eselon III		01 orang	-
2	Eselon IV.a	09 orang	04 orang	13 orang
3	Eselon IV.b	11 orang	17 orang	28 orang

Sumber Data : Kecamatan Padang Panjang Barat, Desember 2023

Tabel 1.4
Data Kepegawaian Menurut Jenjang Pendidikan

No.	Uraian	Jumlah		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1	Strata II	-	-	-
2	Strata I	24 orang	20 orang	44 orang
3	Diploma III	02 orang	02 orang	04 orang
5	SLTA	11 orang	08 orang	19 orang
4	SLTP	-	-	-
6	Strata II	-	-	-
7	Strata I	24 orang	20 orang	44 orang

Sumber Data : Kecamatan Padang Panjang Barat, Desember 2023

4. ASPEK STRATEGIS KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Kecamatan maka Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang secara umum memiliki fungsi strategis yaitu merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan. Dalam hal ini menyelenggarakan urusan pemerintahan umum; mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; mengupayakan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota; pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan; pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan; melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota yang tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota yang ada di kecamatan; melaksanakan administrasi kecamatan; dan melaksanakan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

5. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Isu strategis dalam perencanaan pembangunan daerah merupakan dasar dalam menentukan tujuan dan sasaran penyelenggaraan pembangunan di masa yang akan datang. Selain itu, isu strategis juga berkaitan dengan permasalahan yang belum dapat diselesaikan pada perencanaan tahun sebelumnya dan akan berdampak terhadap keberlanjutan pembangunan selanjutnya. Oleh sebab itu maka perlu upaya untuk mengatasinya. Isu strategis yang disepakati dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang yang dari kebijakan pembangunan daerah (RPJP dan RPJMD).

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta tata kerja, Kecamatan Padang Panjang Barat masih menemui permasalahan utama (strategic issued) dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam mencapai target Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana pelayanan
2. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur
3. Belum optimalnya partisipasi masyarakat

B. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah disusun berdasarkan sistematika yang ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN

Memuat gambaran umum mengenai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang dan memuat permasalahan utama yang dihadapi organisasi.

Bab II : PERENCANAAN KINERJA

Dalam bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang.

Bab III: AKUNTABILITAS KINERJA

a. Dalam sub bab ini diuraikan capaian kinerja Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang sesuai dengan hasil pengukuran kinerja.

b. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini menguraikan anggaran yang tersedia dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV: PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Tindaklanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan kemajuan kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas capaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah.

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

2.1 RENSTRA

Rencana Strategis Kecamatan Padang Panjang Barat adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih. Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Dalam hal ini Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang telah menyusun Renstra Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2018-2023 dengan 1 (satu) Tujuan dan 1 (satu) Sasaran Strategis.

Pada tahun 2021 terjadi Perubahan pada Renstra Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang 2018-2023 yang mana sebelumnya terdiri dari 1 tujuan, 1 sasaran dan 3 indikator sasaran menjadi 1 tujuan, 2 sasaran dan 2 indikator sasaran, yang mana dari indikator sasaran tersebut ada yang dihilangkan yaitu “persentase realisasi anggaran Satimisake”.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan satimisake tahun-tahun sebelumnya dan pertimbangan kemampuan keuangan daerah, maka pada Perubahan RPJMD 2018-2023, Indikator Satimisake tidak lagi menjadi kegiatan prioritas. Untuk itu Renstra Kecamatan Padang Panjang Barat 2018-2023 diadakan perubahan disesuaikan dengan RPJMD Perubahan Kota Padang Panjang 2018-2023 yang diatur melalui Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023.

Untuk lebih jelasnya Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Renstra 2018-2023 Kecamatan Padang Panjang Barat dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD Kecamatan Padang Panjang Barat

RPJMD AWAL										RPJMD PERUBAHAN									
NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2019	2020	2021	2022	2023						2019	2020	2021	2022	2023
1	1 Meningkatkan peran serta kelompok/lembaga masyarakat dalam pembangunan	3	4 Persentase lembaga masyarakat aktif	5	6 100	7 90	8 91	9 93	10 95	11	12 Meningkatkan peran serta kelompok/lembaga masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan	13	14 Persentase lembaga masyarakat yang aktif	15	16 100	17 90	18 91	19 93	20 95
			Meningkatnya pelaksanaan satimisake		85	87	89	91	93			Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan		Jumlah anggaran partisipasi/total belanja langsung kec./kel. x 100%	30	33	36	39	42
			Persentase realisasi anggaran SATIMISAKE		21	22	23	24	25			Meningkatnya kualitas layanan publik yang transparan dan akuntabel di Kecamatan dan Kelurahan		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	89	90	91	92	93
			Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kecamatan/Kelurahan											(kuisioner, aplikasi)					
			Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kecamatan/Kelurahan																
			Nilai Layanan kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan/kelurahan		80	80.5	81	81.5	82										
			Nilai Layanan kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan/kelurahan																

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang ada di Kota Padang Panjang agar lebih terarah dan berhasil guna serta berdaya guna, maka pemerintah bersama-sama masyarakat Kota Padang Panjang telah menetapkan visi, misi dan strategi dalam mencapai tujuannya yang tertuang dalam RPJMD Perubahan Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023.

a) Visi

Visi merupakan gambaran bersama mengenai masa depan, berupa komitmen murni tanpa adanya rasa keterpaksaan yang diyakini dan menjadi milik bersama oleh seluruh elemen yang berkepentingan (stakeholder) yang ada di Kota Padang Panjang. Visi Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang Panjang merupakan komitmen politik yang hendak diwujudkan dan sekaligus sebuah gambaran cita-cita untuk bergerak bersama seluruh masyarakat Kota Padang Panjang, pemerintahannya menjunjung amanah membangun negeri, rakyatnya berpartisipasi dalam pembangunan demi kejayaan Padang Panjang, yaitu : **“Untuk Kejayaan Padang Panjang Yang Bermarwah Dan Bermartabat”**

b) Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut, maka ditetapkan misi yang merupakan pembajabaran dari visi. Rumusan misi yang diangkat didasarkan pada isu-isu strategis di Kota Padang Panjang. Misi Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi unggulan Daerah Berbasis Pembangunan Berkelanjutan;
2. Meningkatkan Pemerataan kualitas daya saing SDM Masyarakat yang berakhlak dan berbudaya;
3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif, Inovatif dan Partisipatif.

c) Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai apa yang diharapkan sesuai dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan dari Kecamatan Padang Panjang Barat yaitu **“ Meningkatkan Peran Serta Kelompok / Lembaga Kemasyarakatan Dalam Pembangunan”**

d) Sedangkan Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara kualitatif maupun kuantitatif, spesifik, mudah dicapai ,

rasional dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sasaran dari Kecamatan Padang Panjang Barat terdiri dari 2 sasaran yaitu :

- Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan, Kelurahan;
 - Meningkatnya Kualitas Layanan Publik yang Transparan dan Akuntabel di Kecamatan dan Kelurahan.
- e) Sasaran sendiri biasa direpresentasikan melalui penetapan indikator kinerja. Penetapan indikator ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian kinerja perangkat daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama 2018-2023 Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang:
- Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan;
 - Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Pada tahun 2023 Kecamatan Padang Panjang Barat telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan Perjanjian Kinerja Camat Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang tahun 2023 dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang 2018-2023.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang Tahun 2023 pada Sasaran 2 (dua) Meningkatnya Kualitas Layanan Publik yang Transparan dan Akuntabel di Kecamatan dan Kelurahan dengan indikator Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) tidak sesuai dengan target pada Renstra 2018-2023 dikarenakan pada tahun 2022 telah diadakan perubahan target pada Perjanjian Kinerja Perubahan 2022 dari target 89,50 menjadi 97,80 ini diakibatkan untuk mempertahankan nilai tahun sebelumnya (2021) yaitu sebesar 97,80. Oleh karena itu pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 target pada Sasaran 2 (dua) di atas masih sama dengan tahun 2022 yaitu sebesar 93 sebagaimana tertera dalam tabel Perjanjian Kinerja 2023 berikut ini:

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT KOTA PADANG PANJANG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kecamatan / Kelurahan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan dan kelurahan	42%	42%
2	Meningkatnya kualitas layanan publik yang transparan dan akuntabel di Kecamatan dan Kelurahan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	93	93

No	Program	Anggaran	
		Sebelum	Sesudah
1	Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp 3.670.329.051	Rp 3.653.553.200
2	Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp 4.361.003.652	Rp 4.244.443.150
3	Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp 37.569.950	Rp 44.316.850
4	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 122.087.950	Rp 45.852.450

Untuk Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang tidak ada perubahan target kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT KOTA PADANG PANJANG

Format Pengukuran Capaian Kinerja Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang Tahun 2023 diukur berdasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang Tahun 2023. Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang dan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang Tahun 2023.

Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Padang Panjang Barat beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

1. **Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2023, seperti pada Tabel 3.1 berikut ini :**

Tabel 3.1
Tabel Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)
1	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kecamatan / Kelurahan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan dan kelurahan	42,00%	32,44 %	76,99 %
2	Meningkatnya kualitas layanan publik yang transparan dan akuntabel di Kecamatan dan Kelurahan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	93,00 %	93.90 %	100 %

➤ **Sasaran I : “Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan / Kelurahan”.**

Untuk pencapaian Target Sasaran Pertama dengan Indikator Kinerja “Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan” dengan Definisi Operasional: “Perbandingan Jumlah Anggaran Partisipasi (2023) dengan Total Belanja Langsung Kecamatan dan Kelurahan (2023) dan dinyatakan dalam persentase”.

Dengan Rumus :

$$\frac{\text{Jumlah Anggaran Partisipasi}}{\text{Total Belanja Langsung Kecamatan Dan Kelurahan}} \times 100\%$$
$$\frac{\text{Rp. 6.150.070.000,-}}{\text{Rp. 7.988.165.650,-}} \times 100\%$$
$$= 32,44\%$$

(Sumber Data : Kecamatan Padang Panjang Barat Tahun 2023)

Yang dimaksud dengan anggaran belanja langsung pada kecamatan dan kelurahan yaitu keseluruhan anggaran belanja langsung pada kecamatan dan kelurahan di tahun berjalan, sedangkan untuk anggaran partisipasi dihitung dengan asumsi/perkiraan dana/anggaran partisipasi masyarakat pada kegiatan-kegiatan seperti:

- Kehadiran rapat kelurahan
- Kehadiran musrenbang RT
- Kehadiran musrenbang Kelurahan
- Kehadiran musrenbang Kecamatan
- Lomba
- Pertandingan olah raga
- Lomba Kel Berprestasi
- Lomba HUT KOTA HUT RI
- Pelatihan Keolahragaan Kelurahan
- Goro Persiapan Khatam
- Goro persiapan untuk kegiatan Qurban
- Kegiatan gotong royong lainnya yang melibatkan masyarakat
- dan lain-lain.

Untuk realisasi tahun 2023 pencapaian Sasaran Strategis Pertama dengan Indikator Sasaran “Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan” dengan target sebesar 42% dan realisasi sebesar 32,44% dengan capaian realisasi 76.99%. Faktor pengungkit dari pencapaian ini masih cukup tingginya

kepedulian masyarakat seperti tahun sebelumnya dalam ikut berpartisipasi seperti kegiatan gotong royong, kegiatan perlombaan dan lain-lain serta keterlibatan masyarakat dalam suatu proses pembangunan diwilayah Kecamatan Padang Panjang Barat.

➤ **Sasaran II “Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Yang Transparan dan Akuntabel di Kecamatan dan Kelurahan”.**

Sebagai Indikator Capaian Kinerja Sasaran yang diukur dengan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mengetahui opini publik terkait pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan Padang Panjang Barat sehingga Kecamatan Padang Panjang Barat dapat meningkatkan kualitas pelayanan baik dari segi Sumber daya Manusia, Sarana Prasarana Layanan, Prosedur Pelayanan serta mengembangkan inovasi-Inovasi terkait pelayanan Publik. Terdapat 17 Unsur yang dinilai, sebagai berikut:

1. Pemenuhan Persyaratan Pelayanan
2. Kemudahan Prosedur Pelayanan
3. Waktu Penyelesaian Pelayanan
4. Ketepatan Waktu Jadwal Pelayanan
5. Kesesuaian Biaya Pelayanan Yang Dikeluarkan
6. Kesesuaian Hasil Pelayanan Yang Didapatkan
7. Kemampuan Dan Keterampilan Petugas Dalam Melayani
8. Kamampuan Komunikasi Petugas Layanan
9. Kesopanan Dan Keramahan Petugas Dalam Memberikan Pelayanan
10. Kedisiplinan Petugas Selama Proses Pelayanan
11. Tata Cara Pengaduan Pelayanan
12. Kelengkapan Sarana Pelayanan (komputer, printer, lemari dokumen,dll)
13. Kelengkapan Sarana Pendukung Pelayanan (kursi ruang tunggu, kipas angin, tempat sampah, dll)
14. Kelengkapan Prasarana Pelayanan (bangunan kantor:ruang tunggu, ruang layanan, kantor, dll)
15. Kelengkapan Prasarana Pendukung Pelayanan (tempat parkir, toilet, mushalla, dll)

16. Fasilitas Layanan Informasi
17. Ketersediaan Sarana Kebersihan Lingkungan Layanan

Pada tahun 2023 hasil perhitungan nilai SKM setiap unsur pelayanan, mayoritas kinerja unsur pelayanan adalah Sangat Baik. Dari 17 unsur pelayanan yang ada, terdapat 15 unsur pelayanan yang berada pada nilai kinerja unsur pelayanan Sangat Baik, 1 unsur pelayanan lainnya masuk dalam kategori kinerja unsur pelayanan Baik dan 1 unsur yang termasuk dalam kinerja unsur pelayanan Kurang Baik. Sehingga realisasi tahun 2023 ini memperoleh Nilai SKM sebesar 93,90 dari target yang ditetapkan sebesar 93 atau persen capaian sebesar 100,96%, namun masih dalam kategori mutu kinerja pelayanan Sangat Baik atau A, seperti dalam tabel berikut ini.

Rumus Penghitungan SKM:

Total Nilai Interval Konversi IKM x 25

Total NIK IKM Tahun 2023 = 3,756 x 25

= 93,90 / SANGAT BAIK

**Kelompok unsur Berdasarkan 9 ruang lingkup
Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang**

No	Unsur Pelayanan	Nilai Total	Rata-rata Per Unsur	Nilai rata-rata per Kelompok Unsur	Nilai IKM Konversi	Kinerja per Unsur Pelayanan
1	Persyaratan Layanan			4.000	0.444	
1.1	Pemenuhan persyaratan pelayanan	120	4.000			Sangat baik
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Layanan			3.400	0.377	
2.1	Kemudahan prosedur pelayanan	102	3.400			Sangat baik
3	Waktu penyelesaian pelayanan			4.000	0.444	
3.1	Waktu penyelesaian pelayanan	120	4.000			Sangat baik
3.2	Ketepatan waktu jadwal pelayanan	120	4.000			Sangat baik
4.	Biaya/Tarif			4.000	0.444	
4.1	Kesesuaian biaya pelayanan yang dikeluarkan dengan biaya yang telah ditetapkan	120	4.000			Sangat baik
5.	Produk Spesifikasi Jenis Layanan			4.000	0.444	
5.1	Kesesuaian hasil pelayanan yang didapatkan dengan yang ditetapkan	120	4.000			Sangat baik
6.	Kompetensi Pelaksana			3.967	0.440	
6.1	Kemampuan dan keterampilan petugas dalam melayani	120	4.000			Sangat baik
6.2	Kemampuan komunikasi petugas pelayanan	118	3.933			Sangat baik

7.	Perilaku Pelaksana			3.900	0.433	
7.1	Kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan	117	3.900			Sangat baik
7.2	Kediplinan petugas selama proses pelayanan	117	3.900			Sangat baik
8.	Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan			2.600	0.289	
8.1	Tata cara pengaduan pelayanan	78	2.600			Baik
9.	Sarana dan Prasarana			3.972	0.441	
9.1	Kelengkapan sarana pelauanan (computer, printer, lemari dokumen, dll)	120	4.000			Sangat baik
9.2	Kelengkapan sarana pendukung pelayanan (kursi ruang tunggu, kipas angin, tempat sampah, dll)	118	3.933			Sangat baik
9.3	Kelengkapan praeana pelayanan (Bangunan kantor : ruang tunggu, ruang layanan, kantor dll)	120	4.000			Sangat baik
9.4	Kelengkapan prasarana pendukung pelayanan (tempat parker, toilet, mushala, dll)	120	4.000			Sangat baik
9.5	Faislitas layanan informasi	117	3.900			Sangat baik
9.6	Keterbatasan sarana kebersihan lingkungan layanan	120	4.000			Sangat baik
	TOTAL	1967	65.567	33.839	3.756	
	Nilai IKM Unit Layanan			93.90		
	Mutu			A		
	Kinerja Pelayanan			Sangat Baik		

Sumber Data : Laporan Hasil SKM Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Andalas, 2023

Adapun produk layanan pada Kecamatan Padang Panjang Barat yang diberikan kepada masyarat sebanyak 8 (delapan) Layanan pada tahun 2023, yaitu :

1. Surat Rekomendasi Dispensasi Nikah
2. Legalisasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
3. Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris Kepemilikan Tanah dan Surat Ahli Waris Pensiunan PNS
4. Legalisasi Surat Susunan Keluarga untuk Pensiunan PNS
5. Legalisasi Surat Jaminan Kesehatan Masyarakat Padang Panjang (JKMPP)
6. Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu
7. Legalisasi Surat Keterangan Bersih Diri (SKBD)
8. Legalisasi Keterangan Domisili

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja selama 5 (lima) Tahun 2023, Tahun 2022, Tahun 2021, Tahun 2020 serta Tahun 2019, seperti pada Tabel 3.2 berikut ini :

Tabel 3.2
Tabel Perbandingan Capaian Kinerja (per Sasaran Strategis)

SASARAN STRATEGIS I : "Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan / Kelurahan"		Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan / Kelurahan	21%	21%	100%	22%	22%	100%	21,00%	21.00	100%	39.00%	35,57%	91.21%	42.00%	32,66%	76,69%
SASARAN STRATEGIS II : "Meningkatnya kualitas layanan publik yang transparan dan akuntabel di Kecamatan dan Kelurahan"		Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
No	INDIKATOR KINERJA SASARAN	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
2	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	80	80	100	80.5	80.5	100%	81	91.75	113.27%	92	91.75	99.73%	93	93.90	100%

Penjelasan Tabel 3.2 :

Dari tabel perbandingan capaian kinerja diatas dapat dilihat adanya peningkatan capaian dari indikator kinerja yaitu pada “Indikator Kinerja Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan” dari tahun ke tahun mengalami penurunan seperti tahun 2021 target 21%, realisasi 21% dengan capaian 100%, pada tahun 2022 target 39%, realisasi 35.57 % dengan capaian kinerja 91,21% dan pada tahun 2023 ini dengan target 42%, realisasi 32,66%, capaian kinerja 76.69%. Ini menunjukkan bahwa belum adanya keberhasilan dari indikator ini dimana belum optimalnya dari keterlibatan masyarakat dalam ikut berpartisipasi dalam pembangunan di wilayah Kecamatan Padang Panjang Barat masih cukup tinggi.

Indikator Kinerja Sasaran yang kedua yaitu Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM). Pada indikator ini Kecamatan Padang Panjang Barat melakukan penilaian dengan cara penyebaran kuisisioner kepada masyarakat yang bertujuan untuk mengetahui opini publik terkait pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan Padang Panjang Barat sehingga Kecamatan Padang Panjang Barat dapat meningkatkan kualitas layanan baik dari segi Sumber daya Manusia, Sarana Prasarana Layanan, Prosedur Pelayanan serta mengembangkan Inovasi-Inovasi terkait pelayanan Publik. Nilai SKM dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup tinggi, hal tersebut tidak terlepas dari peran aktif semua pihak dalam memajukan Kecamatan Padang Panjang Barat. Tahun 2019 target 80, realisasi 80 dan persentase capaian 100% tahun 2020 dengan target 80.5 realisasi 80.5 dan persentase capaian 100 %, tahun 2021 dengan target 81, realisasi sebesar 91.75 dan persentase capaian sebesar 113,27%, dan Dari tahun ke tahun penilaian kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang semakin meningkat tetapi untuk tahun 2022 mengalami penurunan dengan target 92, realisasi sebesar 91.75 dan persentase capaian sebesar 99.73%.. Tetapi pada tahun 2023 ini target 93 dan untuk realisasi 2023 ini mengalami peningkatan kembali menjadi 93,90 dengan persentase capaian 100,96 %.

3. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Target Yang Akan Dicapai Pada Akhir Periode Renstra OPD (Tahun 2023) seperti pada Tabel 3.3 berikut ini :

Tabel 3.3
Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Target Akhir Renstra (per Sasaran Strategis)

SASARAN STRATEGIS I : “Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan / Kelurahan”

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI TAHUN 2023	TARGET AKHIR RENSTRA	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)
1	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan / Kelurahan	32.66%	42%	76.69 %

SASARAN STRATEGIS II : “Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Yang Transparan Dan Akuntabel Di Kecamatan Dan Kelurahan”

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI TAHUN 2023	TARGET AKHIR RENSTRA	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	93.90	93	100.96%

Berdasarkan tabel di atas, untuk tabel Indikator dari Sasaran I (satu) yaitu “Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan/Kelurahan” dengan realisasi sebesar 32.66 % dari target 42 % dengan capaian 76.69 %, lalu indikator dari sasaran II (dua) yaitu Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan target 93 dengan realisasi 93,90 atau persentase capaian 100.96%. Indikator dari sasaran I (satu) ini mengalami penurunan disebabkan kurang optimalnya lembaga masyarakat di Kecamatan Padang Panjang Barat yang terlibat dalam pembangunan. Dari kedua tabel ini dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Padang Panjang Barat telah berhasil dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mendukung sasaran strategis yang telah di tetapkan pada awal tahun RPJMD maupun pada RPJMD Perubahan Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Faktor Pendorong untuk tercapainya Kinerja yang tinggi ini disebabkan :

- a. Koordinasi rutin antara kelurahan dengan lembaga kemasyarakatan;
- b. Sinergitas yang baik antara Kecamatan, Kelurahan dan Tokoh Masyarakat dalam pembangunan wilayah.
- c. Koordinasi rutin tingkat Kecamatan dengan Forkopimca (forum koordinasi pimpinan tingkat kecamatan) setiap tiga bulan sekali (triwulan) mengenai ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Evaluasi capaian kinerja yang dilakukan secara formal maupun informal.

Faktor Penghambat dalam pelaksanaan untuk mencapai Indikator tujuan dan sasaran strategis serta indikator program masih ditemukan beberapa kendala atau permasalahan antara lain :

1. Ketidakjelasan mengenai informasi dan sarana pengaduan layanan yang tersedia, kotak saran tersedia namun tidak difungsikan, hal tersebut dapat dilihat dari pencapaian target SKM tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.
2. Belum optimalnya kualitas SDM/personil pada Kecamatan Padang Panjang Barat;
3. Keterbatasan anggaran untuk peningkatan sarana prasarana dikarenakan adanya refocusing anggaran;

Rencana Tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut maka perlu dilakukan usaha-usaha sebagai berikut :

1. Mensosialisasikan alur pengaduan langsung terhadap masyarakat;
2. Membuat Standar Pelayanan setiap jenis layanan;
3. Perlu peningkatan kualitas SDM/personil di Kecamatan maupun di tingkat Kelurahan melalui bimtek/diklat;
4. Menganggarkan peningkatan sarana prasarana pelayanan pada tahun berikutnya.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Kecamatan Padang Panjang Barat ke depan, sebagai berikut :

1. Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
2. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
3. Pembangunan Kewilayahan
4. Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan
5. Keterbukaan Informasi Publik

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mencapai tujuan Kecamatan Padang Panjang Barat yaitu meningkatkan peran serta kelompok/lembaga masyarakat dalam pembangunan serta sasaran partisipasi

masyarakat dalam pembangunan kelurahan dan kecamatan, maka diperlukan Sumber Daya yang memadai, berupa :

- Sumber Daya Manusia yang kompeten
- Sumber Dana yang mencukupi
- Sarana dan Prasarana yang memadai

Tabel. 3.4
Analisis Efisiensi Sumber Daya

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan/ Kelebihan	Tindak Lanjut
Kualitas dan kuantitas SDM aparatur yang optimal.	Ketidakseimbangan antara kualitas dan kuantitas SDM aparatur yang ada.	Kurang optimalnya dalam hal peningkatan kualitas SDM aparatur.	Evaluasi kinerja SDM serta mengadakan pelatihan/bimtek bagi SDM aparatur secara merata.
Ketersediaan sumber dana yang cukup untuk pelaksanaan kegiatan	Sumber dana yang tersedia masih belum mencukupi kebutuhan pelaksanaan kegiatan	Kekurangan sumber dana mempengaruhi kinerja pelaksanaan kegiatan	Membuat perencanaan anggaran tambahan untuk mencapai target kebutuhan pelaksanaan kegiatan.
Tercukupinya sarana prasarana kerja untuk mendukung operasional kegiatan	Sarana dan prasarana yang mendukung operasional kegiatan di Kecamatan dan Kelurahan, masih belum memadai.	Kekurangan jumlah perangkat elektronik (komputer dan printer) dan fasilitas mobiler (meja kerja, lemari penyimpanan file, kursi kerja, dll)	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan.

B. REALISASI ANGGARAN

Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang memiliki fungsi sebagai

penunjang urusan pemerintah, yaitu urusan Urusan Wajib, Urusan Pemerintahan Umum mendapat alokasi anggaran di tahun 2023 sebesar Rp. 18.254.003.430,- dan realisasi sebesar Rp. 17.827.175.773,- atau 97,66 %. Dilaksanakan oleh Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang. Dengan realisasi Program, Kegiatan dan subkegiatan sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota total dana sebesar Rp. 10.265.837.780,- realisasi keuangan sebesar Rp. 10.034.868.419 (97,75%) dengan kegiatan :
 - a) Kegiatan Administrasi Keuangan dengan dana sebesar Rp. 8.157.962.812,- realiasi keuangan sebesar Rp. 8.070.297.486,- (98,93%) dengan subkegiatan sebagai berikut :
 1. Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar Rp. 8.157.962.812,- Kegiatan ini bertujuan untuk membayarkan Gaji dan Tunjangan Tambahan Penghasilan PNS di Lingkungan Kecamatan Padang Panjang Barat. Realissi Fisik. Subkegiatan ini mencapai 100 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 8.070.297.486,- (98,93%) Hasil subkegiatan ini berupa terbayarnya Gaji dan Tunjangan PNS di Lingkungan Kecamatan Padang Panjang Barat.
 - b) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan dana sebesar Rp. 664.895.440,- realisasi keuangan sebesar Rp. 623.633.019,- (93,79%) dengan subkegiatan sebagai berikut :
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 31.621.650,-. Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang penerangan kantor Realisasi Fisik kegiatan ini mencapai 100 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 26.198.750,- (82,28%). Hasil kegiatan ini berupa alat-alat listrik di Kantor Camat Padang Panjang Barat dan Kelurahan se Kecamatan Padang Panjang Barat
 2. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 107.512.100,-. Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang kegiatan administrasi perkantoran, terlaksananya kebersihan perkantoran. Realisasi Fisik Subkegiatan ini mencapai 100 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 101.527.750 (94,43%). Hasil kegiatan ini berupa tersedianya Alat tulis kantor, peralatan penunjang computer, alat

kebersihan dan retribusi kebersihan di Kantor Camat Padang Panjang Barat dan Kelurahan se Kecamatan Padang Panjang Barat

3. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan anggaran sebesar Rp. 44.051.150,-. Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang urusan administrasi perkantoran. Realisasi Fisik Subkegiatan ini mencapai 100 % dan realisasi keuangan sebesar Rp 35.696.000,- (81,03%). Hasil kegiatan ini berupa tersedianya barang cetak dan penggandaan (spanduk, fotocopy surat menyurat, Jilid DPA, DPPA 2023, Cetak Map) di Kantor Camat Padang Panjang Barat dan Kelurahan se Kecamatan Padang Panjang Barat
 4. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 481.710.540. Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang rapat-rapat koordinasi yang dilaksanakan di dalam maupun luar kota dan luar daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang kegiatan administrasi perkantoran. Realisasi Fisik kegiatan ini mencapai 100 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 460.210.519,- (95,54%). Hasil kegiatan ini berupa Rapat Koordinasi di Kantor Camat Padang Panjang Barat dan Kelurahan se Kecamatan Padang Panjang Barat serta Rapat Koordinasi keluar Kota dan Luar Propinsi Sumatera Barat
- c) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan dana sebesar Rp. 1.086.329.778,-. Realisasi keuangan sebesar Rp.1.019.756.609,- (93,87%) dengan subkegiatan sebagai berikut :
1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran sebesar Rp. 1.500.000,-. Kegiatan ini bertujuan untuk pelayanan surat menyurat kantor. Realisasi Fisik kegiatan ini mencapai 100 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.500.000,- (100,00%). Hasil kegiatan ini tersedianya materai di lingkungan Kecamatan Padang Panjang Barat.
 2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp. 91.779.378,-. Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi tagihan telpon, listrik dan air di Lingkungan Kecamatan Padang Panjang Barat. Realisasi Fisik kegiatan ini mencapai 100 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 71.901.889,- (78,34%). Hasil dari kegiatan ini berupa pembayaran tagihan air, listrik dan telpon di Lingkungan Kecamatan Padang Panjang Barat

3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 993.050.400,-. Kegiatan ini bertujuan untuk pembayaran Honor Pegawai Administrasi dan Tenaga Harian Lepas di Lingkungan Kecamatan Padang Panjang Barat. Realisasi Fisik dari kegiatan ini mencapai 100 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 946.354.720,- (95,30%). Hasil kegiatan ini terbayarnya honor 2 (dua) orang Pegawai Harian, 11 (Sebelas) orang Operator Kelurahan, 10 (sepuluh) orang Petugas Kebersihan, 2 (dua) orang sopir dan 9 (sembilan) orang Penjaga Kantor Kelurahan dan Kecamatan.
- d) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan dana sebesar Rp. 356.649.750,-. Realisasi keuangan sebesar Rp. 321.181.305,- (90,06%) dengan subkegiatan sebagai berikut :
1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran sebesar Rp. 183.199.750,-. Kegiatan ini bertujuan untuk perawatan dan pemeliharaan kendaraan dinas. Realisasi Fisik dari kegiatan ini mencapai 100 % dan realisasi keuangan sebesar Rp.156.684.900,- (85,53%). Hasil kegiatan ini berupa terpeliharanya kendaraan dinas di lingkungan Kecamatan Padang Panjang Barat.
 2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 58.100.000,-. Kegiatan ini bertujuan untuk pemeliharaan gedung kantor. Realisasi Fisik dari kegiatan ini mencapai 100 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 55.701.250,- (95,87%). Hasil kegiatan ini terpeliharanya peralatan dan mesin kantor Kelurahan dan Kecamatan (Printer, Komputer, Laptop, CCTV, Meja, Kursi, Lemari) dan dapat dibayarkannya belanja jasa non pegawai (upah) Kecamatan dan Kelurahan selama 1 tahun.
 3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp.115.350.000,-. Kegiatan ini bertujuan untuk Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor. Realisasi Fisik dari kegiatan ini mencapai 100 % realisasi keuangan sebesar Rp. 108.795.155,- (94,32%). Hasil kegiatan ini berupa telah terpeliharanya Gedung Kantor Camat Padang Panjang Barat, Rumah Dinas Camat Padang Panjang Barat serta Gedung Kantor Lurah, Gedung

Pertemuan se Kecamatan Padang Panjang Barat yang menjadi asset Kecamatan Padang Panjang Barat

- 2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dengan dana sebesar Rp 4.244.443.150,- realisasi keuangan sebesar Rp. 4.120.225.506,- (97,07%) dengan subkegiatan sebagai berikut :
 - a) Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum dengan dana sebesar Rp. 1.663.661.700,- realisasi keuangan sebesar Rp.1.625.774.506,- (97,72%) dengan subkegiatan sebagai berikut :
 1. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum dengan dana sebesar Rp 1.663.661.700,-. Kegiatan ini bertujuan untuk pemeliharaan fasilitas umum di wilayah masing-masing Kelurahan di Lingkungan Kecamatan Padang Panjang Barat. Realisasi Fisik dari kegiatan ini mencapai 100 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.625.774.506 (97,72%). Hasil kegiatan ini berupa pembayaran honor THL (Petugas Kebersihan Lapangan, Operator Bentor) Pemeliharaan Kendaraan Roda Tiga, pembayaran pajak Becak Motor dan Tersedianya Bahan dan perlengkapan kebersihan lapangan Kelurahan se Kecamatan Padang Panjang Barat.
 - b) Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dengan dana sebesar Rp. 2.580.781.450,- realisasi keuangan sebesar Rp. 2.494.451.000,- (96,65%) dengan subkegiatan sebagai berikut :
 1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dengan dana sebesar Rp. 2.580.781.450,-. Kegiatan ini bertujuan untuk Pembinaan Karang Taruna, Kader Posyandu serta Pokja Sehat. Realisasi Fisik dari kegiatan ini mencapai 100 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.494.451.000,- (96,65%). Hasil Kegiatan ini berupa pembayaran Honor Kader Posyandu, Pemberian Makan Tambahan untuk Balita, Pembinaan Pokja Sehat dan Karang Taruna.
- 3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dengan dana sebesar Rp 3.653.553.200,- realisasi keuangan sebesar Rp. 3.594.434.723,- (98,38%) dengan subkegiatan sebagai berikut :

- a) Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan dengan dana sebesar Rp. 798.905.650,- realisasi keuangan sebesar Rp. 750.436.373,- (93,93%) dengan subkegiatan sebagai berikut :
1. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan dengan dana sebesar Rp. 187.592.300,-. Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi Penyelenggaraan Musrenbang tingkat kecamatan dan kelurahan. Realisasi Fisik dari kegiatan ini mencapai 100 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 177.178.023,- (94,45%). Hasil kegiatan ini yaitu terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang tingkat kecamatan dan kelurahan
 2. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan dengan dana sebesar Rp. 150.000.000,-. Kegiatan ini bertujuan untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan. Realisasi Fisik dari kegiatan ini mencapai 100 % dan realisasi keuangan sebesar Rp.148.781.100,- (99,19%). Hasil kegiatan ini yaitu terlaksananya Pembangunan Sarana di Lingkungan Kecamatan Padang Panjang Barat berupa pembuatan Dam dan jalan di Kelurahan Kampung Manggis
 3. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dengan dana sebesar Rp. 461.313.350,-. Kegiatan ini bertujuan untuk Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. Realisasi Fisik dari kegiatan ini mencapai 100 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 424.477.250,- (92,01%). Hasil kegiatan ini yaitu terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan berupa sosialisasi dan pelatihan bagi masyarakat di wilayah masing-masing Kelurahan se Kecamatan Padang Panjang Barat, Pembinaan dan Pembayaran Honor LPM, Posyantek di Kelurahan.
- b) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dengan dana sebesar Rp. 2.854.647.550,- realisasi keuangan sebesar Rp. 2.843.998.350,- (99,63%) dengan subkegiatan sebagai berikut :
1. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan dengan dana sebesar Rp. 2.854.647.550,-. Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi Kegiatan RT dan LPM. Realisasi Fisik dari kegiatan ini mencapai 100 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.843.998.350,- (99,63%). Hasil kegiatan ini berupa terlaksananya pembayaran Honor Perangkat RT dan makan minum kegiatan

RT serta Pengadaan Pakaian seragam Ketua RT dan Study Tour Perangkat RT se Kecamatan Padang Panjang Barat.

- 4) Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum dengan dana sebesar Rp. 44.316.850,- realisasi keuangan sebesar Rp. 36.541.875 (82,46%) dengan subkegiatan sebagai berikut :
 - a) Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan dana sebesar Rp. 44.316.850,- realisasi keuangan sebesar Rp..36.541.875,- (82,46%) dengan subkegiatan sebagai berikut :
 1. Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan dengan dana sebesar Rp. 44.316.850,-. Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi FKPM Kecamatan Padang Panjang Barat. Realisasi Fisik dari kegiatan ini mencapai 100 % dan realisasi keuangan sebesar Rp.36.541.875,- (82,46%). Hasil kegiatan ini yaitu terlaksananya Koordinasi antar Babin Kelurahan dan Kecamatan dalam mencegah tindak kejahatan di wilayah Kecamatan Padang Panjang Barat
- 5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan dana sebesar Rp..45.852.450,- realisasi keuangan sebesar Rp. 41.105.250,- (89,65%) dengan subkegiatan sebagai berikut
 - a) Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan dana sebesar Rp. 45.852.450,- realisasi keuangan sebesar Rp..41.105.250 (89,65%) dengan subkegiatan sebagai berikut :
 1. Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional dengan dana sebesar Rp. 30.677.850,- Kegiatan ini bertujuan untuk Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama. Realisasi Fisik dari kegiatan ini mencapai 100 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 28.821.250 (93,95%). Hasil Kegiatan ini berupa penyampaian informasi melalui Kegiatan Tim Ramadhan yang turun berkunjung ke Mushalla yang diusulkan oleh Kelurahan di Bulan Ramadhan.
 2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dengan dana sebesar Rp. 15.174.600,-. Kegiatan ini bertujuan untuk

dijalankannya kegiatan Forum Koordinasi dan Diskusi Pimpinan Tentang Masalah Kedinasan Kamtibmas di Kecamatan. Realisasi Fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 12.284.000 (80,95%). Hasil kegiatan ini yaitu terlaksananya Rapat Koordinasi dan Diskusi Pimpinan Tentang Masalah Kedinasan Kamtibmas di Kecamatan yang dilaksanakan per triwulan selama Tahun 2023

Tabel 3.5

Capaian Kinerja Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023
Kecamatan Padang Panjang Barat

No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target	Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
						Fisik/Rp.	(%)		
1	Kewilayahan	Kecamatan Padang Panjang Barat	5	6	7	8	9	10	11
			1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100	100	100		
			a). Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dana	10.265.837.780	10.034.868.419	97,75		
			- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan layanan keuangan perangkat daerah	100	100	100		
				Jumlah dana	8.157.962.812	8.070.297.486	98,93		
				Jumlah ASN yang Dibayarkan Gaji dan Tunjangan	71 orang	65 orang	91,55	Adanya PNS yang mutasi ke OPD lain	Permintaan tambahan PNS ke OPD Kecamatan Padang Panjang Barat
				Jumlah dana	8.157.962.812	8.070.297.486	98,93		
			b). Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	100		
			- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dana	664.895.440	598.295.024	93,52		
				Jumlah peralatan listrik yang diadakan	jenis komponen peralatan listrik	jenis komponen peralatan listrik	100		
				Jumlah dana	31.621.650	26.198.750	82,85		
			- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat tulis kantor yang disediakan	10 jenis komponen bahan logistik yang diadakan	10 jenis komponen bahan logistik yang diadakan	100		
				jumlah peralatan kebersihan yang disediakan					
				Jumlah Dana	107.512.100	101.527.750	94,43		

<p>- Penyediaan Barang dan Cetakan Penggandaan</p>	<p>Jumlah barang cetakan dan Penggandaan yang diadakan</p>	<p>2 jenis komponen barang yang dicetak dan diadakan Fotocopy , jilid, cetak map, cetak amplop</p>	<p>2 jenis komponen barang yang dicetak dan diadakan Fotocopy , jilid, cetak map, cetak amplop</p>	<p>100</p>			
<p>- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</p>	<p>Jumlah Dana rapat yang dilaksanakan</p>	<p>2900 kali</p>	<p>35.696.000</p>	<p>81,03</p>			
<p>c) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p>	<p>Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti</p>	<p>90 kali</p>	<p>83 kali</p>	<p>92,00</p>			
<p>- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</p>	<p>Jumlah Dana</p>	<p>481.710.540</p>	<p>460.210.519</p>	<p>95,54</p>			
<p>- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</p>	<p>Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan</p>	<p>3 Jenis Urusan (Jasa Kantor, Jasa Surat Menyurat, Pelayanan Umum)</p>	<p>3 Jenis Urusan (Jasa Kantor, Jasa Surat Menyurat, Pelayanan Umum)</p>	<p>100</p>			<p>Untuk Tahun Anggaran 2023 akan direvisi kembali dan untuk belanja jasa tagihan air dan telpon yang realisasinya akan direvisi</p>
<p>- Penyediaan Jasa Surat Menyurat</p>	<p>Jumlah dana</p>	<p>1.086.329.778</p>	<p>1.019.756.609</p>	<p>93,87</p>			<p>Belanja Tagihan air dan telpon yang realisasinya lebih sedikit dari anggaran yang disediakan,</p>
<p>- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</p>	<p>Jumlah Perangko dan Materai yang disediakan</p>	<p>36 Tagihan</p>	<p>36 Tagihan</p>	<p>100</p>			<p>Untuk Tahun Anggaran 2023 akan direvisi kembali dan untuk belanja jasa tagihan air dan telpon yang realisasinya akan direvisi</p>
<p>- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</p>	<p>Jumlah tenaga harian lepas dan Pegawai Harian yang dibayarkan honoronya</p>	<p>31 orang THL, 2 orang Pegawai Harian</p>	<p>31 orang THL, 2 orang Pegawai Harian</p>	<p>100</p>			<p>Untuk Tahun Anggaran 2023 akan direvisi kembali dan untuk belanja jasa tagihan air dan telpon yang realisasinya akan direvisi</p>
<p>d) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang</p>	<p>Jumlah Dana</p>	<p>993.050.400</p>	<p>946.354.720</p>	<p>95,30</p>			<p>Untuk Tahun Anggaran 2023 akan direvisi kembali dan untuk belanja jasa tagihan air dan telpon yang realisasinya akan direvisi</p>
<p>- Penyediaan Jasa Surat Menyurat</p>	<p>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan</p>	<p>24 jenis peralatan dan mesin, 13 unit</p>	<p>24 jenis peralatan dan mesin, 13 unit</p>	<p>100</p>			<p>Untuk Tahun Anggaran 2023 akan direvisi kembali dan untuk belanja jasa tagihan air dan telpon yang realisasinya akan direvisi</p>

Urusan Pemerintahan Daerah	Pemerintahan Daerah yang dipelihara	gedung	gedung	gedung	gedung
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah dana	356.649.750	321.181.305	90,06	
	Jumlah kendaraan yang dipelihara, jumlah BBM yang disediakan, jumlah pajak kendaraan yang dibayarkan	2 kendaraan dinas beroda 4, 36 kendaraan dinas beroda 2	2 kendaraan dinas beroda 4, 36 kendaraan dinas beroda 2	100	
	Jumlah dana	183.199.750	156.684.900	85,53	
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	21 jenis peralatan	21 jenis peralatan	100	
	Jumlah dana	58.100.000,	55.701.250	95,87	
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	13 gedung	13 gedung	94,32	
	Jumlah dana	115.350.000	108.795.155	98,68	
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Presentase tingkat layanan	93%	93%	100	
	Jumlah dana	4.244.443.150	4.120.225.506	97,07	
3. a) Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah lokasi pelayanan Persampahan	8 lokasi pelayanan	8 lokasi pelayanan	100	
	Jumlah dana	1.663.661.700	1.625.774.506	97,72	
- Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah lokasi pelayanan Persampahan	8 lokasi pelayanan	8 lokasi pelayanan	100	
	Jumlah petugas persampahan yang dibayarkan gajinya, iuran JKK dan JKM	46 orang THL	46 orang THL	100	
b) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah sarana persampahan yg dipelihara	8 unit bontor	8 unit bontor	100	
	Jumlah dana	1.663.661.700	1.625.774.506	97,72	
b) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelimpahan Urusan Pemerintah yang dilaksanakan	7 jenis urusan (Forum Kecamatan Sehat, Pokja Sehat, Posyandu, Dasawisma, PKK,	7 jenis urusan (Forum Kecamatan Sehat, Pokja Sehat, Posyandu, Dasawisma, PKK,	100	

			Pembinaan UKS, Karang Taruna)	Pembinaan UKS, Karang Taruna)	
		Jumlah dana	2.580.781.450	2.494.451.000	96,65
		Jumlah Forum Komunikasi Kelurahan/Kecamatan Sehat yang dilaksanakan	1 Forum, 8 Pokja Sehat	1 Forum, 8 Pokja Sehat	100
		Jumlah kegiatan Lomba Kader Posyandu yang dilaksanakan	1 kegiatan lomba Posyandu	1 kegiatan lomba Posyandu	100
		Jumlah Kader Posyandu yang dibayarkan Honorinya	270 kader	270 kader	100
		Jumlah Kader Dasawisma yang dibayarkan Honorinya	410 Kader	410 Kader	100
		Jumlah Lomba Dasa Wisma yang difasilitasi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
		Jumlah pembinaan UKS yang dilaksanakan	3 tingkatan Sekolah	3 tingkatan Sekolah	100
		Jumlah PKK yang diberdayakan	9 Lembaga PKK	9 Lembaga PKK	100
		Jumlah dana	2.938.928.600	2.810.293.164	95,62
		Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan/kelurahan	39 %	36 %	100
		4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	3.653.553.200	3.594.434.723	98,38
		a) Pemberdayaan Kelurahan	3 Jenis	3 Jenis	100
		Jumlah jenis Pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan	Pemberdayaan (Musrenbang, Masyarakat, Pembangunan Sarana dan Prasarana)	Pemberdayaan (Musrenbang, Masyarakat, Pembangunan Sarana dan Prasarana)	
		Jumlah dana	798.905.650	750.436.373	93,93
		Jumlah kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan	8 Kegiatan Musrenbang Kelurahan, 1 Kegiatan Musrenbang Kecamatan	8 Kegiatan Musrenbang Kelurahan, 1 Kegiatan Musrenbang Kecamatan	100
		- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
		Jumlah dana	187.592.300	177.178.023	94,45
		- Pembangunan	1 Lokasi (Kampung)	1 Lokasi (Kampung)	100

		yang dilaksanakan	Manggis)	Manggis)		
Sarana dan Prasarana di Kelurahan	Jumlah dana		150.000.000	148.781.100	99,19	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	9 Kegiatan Pelatihan dan Sosialisasi)	9 Kegiatan Pelatihan dan Sosialisasi	100	
b) Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan	Jumlah Posyantek yang difasilitasi	Jumlah Posyantek yang difasilitasi	1 Posyantek Kecamatan	1 Posyantek Kecamatan	100	
	Jumlah Lembaga Masyarakat yang diberdayakan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang diberdayakan	9 lembaga	9 lembaga		
	Jumlah dana	Jumlah dana	461.313.350	424.477.250	92,01	
	Jumlah RT yang difasilitasi	Jumlah RT yang difasilitasi	133 RT	133 RT	100	
5. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah dana	Jumlah dana	2.854.647.550	2.843.998.350	99,63	
	Jumlah RT yang dibayarkan honor nya	Jumlah RT yang dibayarkan honor nya	133 RT	133 RT	100	
	Presentase tingkat koordinasi Trantibum	Presentase tingkat koordinasi Trantibum	93%	93%	100	
a) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah jenis kegiatan koordinasi Trantibum	Jumlah jenis kegiatan koordinasi Trantibum	44.316.850	36.541.875	82,46	
	Jumlah dana	Jumlah dana	9 Forum,	9 Forum	100	
6. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah dana	Jumlah dana	44.316.850	36.541.875	82,46	
	Persentase Fasilitasi dan koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan umum	Persentase Fasilitasi dan koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan umum	93%	93%	100	
a) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai	Jumlah jenis penugasan	Jumlah jenis penugasan	45.852.450	41.105.250	89,65	
	Jumlah jenis penugasan	Jumlah jenis penugasan	2 Penugasan (Forkopimcam, Tim Ramadhan)	2 Penugasan (Forkopimcam, Tim Ramadhan)	100	

		Jumlah dana	45.852.450	41.105.250	89,65	
Penugasan Kepala Daerah	- Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah kegiatan ramadhan yang dilaksanakan	1 kegiatan kunjungan ke mushalla di lokasi kelurahan masing sebanyak 8 kelurahan 30.677.850	1 kegiatan kunjungan ke mushalla di lokasi kelurahan masing sebanyak 8 kelurahan 28.821.250	100	
	- Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah dana	1 Forum (Forkopimca) 15.174.600	1 Forum (Forkopimca) 12.284.000	100	
		Jumlah dana	18.254.003.430	17.827.175.773	80,95	
		Jumlah			97,66	

BAB IV PENUTUP

Penyelenggaraan kegiatan di Kecamatan Padang Panjang Barat pada Tahun Anggaran 2023 merupakan tahun ke 5 (lima) dari Rencana Strategis Kecamatan Padang Panjang Barat Tahun 2018-2023. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target- target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil Laporan Kinerja Kecamatan Padang Panjang Barat tahun 2023 dapat disimpulkan dari analisis 2 (dua) sasaran dan 2 (dua) indikator kinerja utama yang dipilih sebagai tolak ukur yaitu :

1. Pada indikator dari sasaran I (satu) yaitu "Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan/Kelurahan" dengan realisasi sebesar 42% dari target 32,66% dengan capaian 76.99%. Faktor keberhasilan dari pencapaian indikator dari sasaran I ini yaitu belum optimalnya kepedulian masyarakat dalam ikut berpartisipasi seperti kegiatan gotong royong, kegiatan perlombaan dan lain-lain serta keterlibatan masyarakat dalam suatu proses pembangunan diwilayah Kecamatan Padang Panjang Barat, baik dalam bentuk gotong royong maupun mengikuti kegiatan pembangunan sarana dan prasarana;
2. Indikator dari sasaran II (dua) yaitu Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan target 93 dan untuk realisasi 2023 ini mengalami peningkatan menjadi 93,90 atau capaian 100,96%, peningkatan ini bisa terjadi karena ada beberapa indikator penilaian SKM yang mengalami peningkatan.

Faktor Pendorong untuk tercapainya Kinerja yang tinggi ini disebabkan :

- a. Koordinasi rutin antara kelurahan dengan lembaga kemasyarakatan;
- b. Sinergitas yang baik antara Kecamatan, Kelurahan dan Tokoh Masyarakat dalam pembangunan wilayah.
- c. Koordinasi rutin tingkat Kecamatan dengan Forkopimca (forum koordinasi pimpinan tingkat kecamatan) setiap tiga bulan sekali (triwulan) mengenai ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Evaluasi capaian kinerja yang dilakukan secara formal maupun informal.

Faktor Penghambat dalam pelaksanaan untuk mencapai Indikator tujuan dan sasaran strategis serta indikator program masih ditemukan beberapa kendala atau permasalahan antara lain :

1. Ketidakjelasan mengenai informasi dan sarana pengaduan layanan yang tersedia, kotak saran tersedia namun tidak difungsikan, hal tersebut dapat dilihat dari pencapaian target SKM tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.
2. Belum optimalnya kualitas SDM/personil pada Kecamatan Padang Panjang Barat;
3. Keterbatasan anggaran untuk peningkatan sarana prasarana dikarenakan adanya refocusing anggaran;

Rencana Tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut maka perlu dilakukan usaha-usaha sebagai berikut :

1. Mensosialisasikan alur pengaduan langsung terhadap masyarakat;
2. Membuat Standar Pelayanan setiap jenis layanan;
4. Perlu peningkatan kualitas SDM/personil di Kecamatan maupun di tingkat Kelurahan melalui

bimtek/diklat;

5. Menganggarkan peningkatan sarana prasarana pelayanan pada tahun berikutnya.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Kecamatan Padang Panjang Barat ke depan, sebagai berikut :

1. Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
2. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
3. Pembangunan Kewilayahan
4. Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan
6. Keterbukaan Informasi Publik

Hasil yang diperoleh dari pengukuran Sasaran Kinerja ternyata masih banyak kendala, maka diperlukan upaya dan komitmen bersama untuk terus menerus lebih meningkatkan kinerja agar penetapan kinerja yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik serta sebagai bahan dan pedoman untuk mengevaluasi dalam melaksanakan kegiatan selanjutnya.

Padang Panjang, 27 Desember 2023

CAMAT PADANG PANJANG BARAT
KOTA PADANG PANJANG



ROMI AR RAHMAN, ST
NIP. 19821012 201101 1 008



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT

Jalan Rasuna Said No.4 Padang Panjang Kode Pos 27111
email: kec.padangpanjangbarat@padangpanjang.go.id - website:www. Padangpanjang.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FIORI AGUSTIAN, S.IP

Jabatan : Camat Padang Panjang Barat

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama : FADLY AMRAN, BBA

Jabatan : Walikota Padang Panjang

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 02 Januari 2023

Pihak Kedua

Walikota Padang Panjang



FADLY AMRAN, BBA

Pihak Pertama

Camat Padang Panjang Barat



FIORI AGUSTIAN, S.IP
NIP 19880515 201101 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
CAMAT PADANG PANJANG BARAT KOTA PADANG PANJANG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan, kelurahan	Presentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan	42%
2	Meningkatnya kualitas Layanan publik yang transparan dan akuntabel di Kecamatan dan Kelurahan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	93%

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	11.632.913.582	
2	Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	4.459.703.652	
3	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	3.520.329.051	
4	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	37.569.950	
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	152.337.950	



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT KOTA PADANG PANJANG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan, kelurahan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan dan kelurahan	39.20%	39.20%
2	Meningkatnya kualitas Layanan publik yang transparan dan akuntabel di Kecamatan dan Kelurahan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	97.85%	97.85%

	Program	Anggaran	
		Sebelum	Sesudah
1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	11,632,913,582	10,265,837,780
2	Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	4,459,703,652	4,244,443,150
3	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	3,520,329,051	3,653,553,200
4	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	37,569,950	44,316,850
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	152,337,950	45,852,450


 P.J. WALIKOTA PADANG PANJANG
SONNY BUDAYA PUTRA

Padang Panjang, 01 Nopember 2023
 KEPALA OPD

ROMI AR RAHMAN, ST
 NIP. 19821012 201101 1 008